KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU MD3 Terganjal Lobi
Tanggal : Selasa, 04 April 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Revisi UU MD3 Terganjal Lobi

JAKARTA-Revisi terbatas Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masih terdapat ganjalan walau telah diparipurnakan dan dibahas oleh Badan Musyawarah DPR RI. Lantaran, lobi-lobi yang tengah dilakukan oleh para elit partai politik (parpol) belum menghasilkan kesepakatan. Alhasil, rapat lanjutan yang diagendakan 5 April nanti kemungkinan besar akan molor.

"Hasil rapat Bamus (Badan Musyawarah, Red) DPR memutuskan pembahasan Revisi UU MD3 diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg, Red). Jadwal pembahasan revisi masih menunggu lobi antar-elite politik, hasil lobi pimpinan parpol, pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Kalau hari ini selesai ya besok bisa dijadwalkan," ungkap Firman Subagio, Wakil Ketua Baleg DPR RI kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (3/4).

Sedianya, sambung politisi Partai Golkar itu, rapat pembahasan akan digelar hari ini, tetapi ditunda. Firman juga belum memastikan apakah rapat akan digelar pada 5 April, lantaran masih menunggu hasil lobi-lobi tersebut. "Belum, ini kan masih menunggu. Kalau sudah ada kesepakatan ya tak ada masalah mau Selasa atau Rabu. Tergantung hasil pimpinan DPR dan pimpinan partai," kembali Firman menegaskan.

Dia menambahkan, saat sidang pembukaan paripurna Maret lalu, diputuskan revisi terbatas sesuai yang sudah diharmonisasi yakni, penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk mengakomodir Fraksi PDIP. Namun, tidak memungkiri adanya pelebaran dalam pembahasan, tergantung dinamika di lapangan.

"Supaya pembahasan tidak melebar, maka mau dibahas lagi agar konsisten terhadap masalah yang terkait dengan revisi atau inisiatif dewan yang sudah disahkan saat paripurna. Walaupun kemungkinan berubah bisa saja terjadi, tapi kalau konsisten dari awal akan memudahkan. Kita kan harus mengedepankan asas musyawarah," urainya.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, rapat konsultasi pengganti Bamus memang memutuskan pembahasan Revisi UU MD3 akan dibahas di Baleg. Pembahasan pun diputuskan revisi terbatas sesuai yang sudah diharmonisasi yakni, penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk mengakomodir Fraksi PDIP.

"Diserahkan ke Baleg, jadi tidak ada pembahasan. Hanya memberikan penugasan. Rapat Bamus adalah memberikan penugasan kepada Baleg untuk menindaklanjuti," singkatnya di lokasi yang sama, kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengatakan, Revisi terbatas UU MD3 tidak bisa dipungkiri hanya untuk kebutuhan politik di DPR semata. Jadi, tidak salah jika 10 fraksi di DPR meminta jatah kursi pimpinan DPR.

Menurut Irman, tidak salah jika 10 fraksi yang berada di DPR mengusulkan masuk sebagai pimpinan DPR dalam revisi terbatas UU MD3 yang sedang dibahas. "Sehingga ada pemikiran partai lain pun berhak untuk masuk, bisa saja 10 fraksi di DPR jadi pimpinan, jadi tinggal bagaimana protokoler mengatur bagaimana mobilnya nanti," kata Irman.

Sebab, lanjutnya, revisi terbatas UU MD3 itu hanya untuk mengakomodir kebutuhan politik di tanah air khususnya di DPR. "Saya kira memang tidak bisa dipungkiri, revisi UU itu untuk kebutuhan politik. Cuma karena kebutuhan politik, jadi revisi UU," tegasnya. (aen)